

DAFTAR PUSTAKA

- (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2021 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Olgi, R. (2019). *PROSEDUR PENGELUARAN BARANG IMPOR TERHADAP PENANGGUHAN BEA MASUK MELALUI KAWASAN BERIKAT PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari:
<https://repository.uin-suska.ac.id/24896/2/TUGAS%20AKHIR%20OLGI.pdf>
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

